

2 TPS...

Ketua KPPS 52 Caturtunggal, Imam Basuki, mengatakan saat pelaksanaan pemilu Rabu pekan lalu situasi TPS sangat ramai karena banyak didatangi oleh calon pemilih yang hanya membawa KTP-el.

"Kami kewalahan. Sekitar pukul 12.00 WIB ada warga yang berhalangan datang sehingga ada sisa surat suara sekitar 30 lembar. Surat suara itu seharusnya untuk pemilih pemegang A5 yang sudah mendaftar," kata Imam Basuki.

Karena situasi TPS yang ramai, surat suara yang seharusnya hanya untuk pemilih dengan A5 yang sudah mendaftar digunakan oleh pemilih dengan kartu tanda penduduk luar daerah. "Persoalan ini murni miskomunikasi dan kami di KPPS 52 siap melaksanakan PSU," ucap dia.

Belum Jelas

Selain merekomendasikan

pemungutan suara ulang, Bawaslu Sleman juga merekomendasikan pemungutan suara lanjutan (PSL) di beberapa TPS di Sleman.

Meski demikian, hingga saat ini jadwal PSL belum jelas. PSL digelar karena ada puluhan pemilih yang masuk dalam daftar pemilih tambahan (DPTb) tidak bisa memilih calon presiden dan wakil presiden karena kehabisan surat suara.

Komisioner Divisi Hukum KPU Sleman, Ahmad Baehaqi, mengatakan jajarannya masih menunggu persetujuan dari KPU RI terkait dengan rekomendasi Bawaslu Sleman untuk menggelar PSL di beberapa TPS di Sleman.

"Kami sudah menggelar pleno terkait dengan PSL. Surat keputusan hasil rapat pleno sudah kami kirimkan ke KPU RI melalui KPU DIY," kata Ahmad Baehaqi, Rabu.

Saat ini, kata dia, KPU Sleman masih menunggu persetujuan dari KPU RI terkait dengan waktu pelaksanaan, anggaran maupun logistik untuk PSL.

Ketua Bawaslu Sleman, M. Abdul Karim Mustofa, menjelaskan empat TPS yang direkomendasikan untuk PSL meliputi TPS 10 Maguwoharjo, Kecamatan Depok. Di TPS itu ada 58 pemilih yang saat pencoblosan tidak mendapat surat suara DPRD provinsi lantaran habis.

Karim mengatakan yang bisa mengikuti PSL adalah pemilih yang namanya sudah terdaftar dan tercatat di formulir C7 di TPS yang masuk dalam rekomendasi Bawaslu.

"Jadi kalau punya formulir A5 tetapi namanya tidak terdaftar di C7, mereka tidak bisa menyalurkan hak suaranya," kata Karim. PSL perlu digelar lantaran para pemilih di 11 TPS tersebut

tidak bisa menggunakan hak pilihnya dikarenakan kurangnya surat suara.

Di Kota Jogja, KPU Kota Jogja menggelar PSU setelah mendapat rekomendasi dari Bawaslu Kota Jogja terkait dengan terjadinya pelanggaran di sejumlah TPS di tiga kecamatan. Menurut Ketua KPU Kota Jogja, Hidayat Widodo, PSU harus dilaksanakan karena terjadi kesalahan prosedur pemungutan suara di empat TPS. Hidayat mengatakan, PSU di empat TPS tersebut akan dilaksanakan pada Sabtu (27/4).

Di Kabupaten Bantul, KPU Bantul mulai menyiapkan PSU dan PSL di 14 TPS yang rencananya digelar Sabtu (27/4).

"Kami mengupayakan honor tambahan untuk KPPS yang bertugas di PSU. Untuk PSL tidak ada honor tambahan," kata Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Bantul, Mestri Widodo, Rabu. (57 16)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 22 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005